

Judul : Dilema subsidi pupuk
Tanggal : Jumat, 07 Januari 2022
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 7

Dilema Subsidi Pupuk

SETIAP tahun, Pemerintah kita mengeluarkan macam-macam subsidi dengan jumlah rupiah yang besar. antara lain subsidi untuk BBM dan subsidi pupuk. Selama 5 tahun terakhir subsidi yang dikeluarkan Pemerintah untuk pabrik-pabrik pupuk (berikut nilai rupiahnya) tercatat sebagai berikut:

Tahun Anggaran	Tonase (Ton)	Nilai rupiah
2017	9,5	28,6
2018	9,5	28,6
2019	9,5	28,6
2020	9,5	28,6
2021	9,5	28,6
2022	9,5	28,6

Dalam penyampaian Buku II Nota Keuangan beserta RAPBN 2022, Pemerintah telah menetapkan anggaran subsidi pupuk tahun 2022 sebesar Rp 25,27 triliun. Angka ini tidak berubah bila dibandingkan anggaran subsidi pupuk di tahun 2021.

Berdasarkan rencana anggaran tersebut, Menteri Pertanian telah menerbitkan Permentan Nomor 41 Tahun 2021 pada tanggal 30 Desember 2021. Peraturan Menteri Pertanian ini mengatur Alokasi dan HET, Harga Eceran Tertinggi, Pupuk Bersubsidi untuk tahun 2022.

Menurut Permentan tersebut, alokasi yang ditetapkan untuk pupuk bersubsidi berbagai jenis tahun 2022 adalah 9.080.806 ton; sedangkan untuk tahun anggaran 2021 yang baru lewat 9.079.326 ton.

Dengan anggaran yang relatif sama, yaitu Rp 25,27 triliun, Pemerintah mengalokasikan subsidi pupuk 9.079.326 ton ditambah pupuk organik cair sebesar 1.870.380 ton.

Secara umum, Peraturan Menteri Pertanian ini merupakan kabar baik bagi petani, karena Pemerintah tidak mengurangi alokasi subsidi untuk petani. Pertanyaannya: Dengan alokasi tidak berubah ini, apakah dananya cukup?

Masyarakat, bahkan tidak sedikit petinggi Pemerintah, hingga sekarang masih tidak paham apa sebab muncul "pupuk subsidi", apa sebab pupuk perlu

disubsidi Pemerintah dengan jumlah puluhan triliun rupiah.

Jawaban atas pertanyaan ini sebenarnya sederhana: karena harga pupuk akan tinggi sekali jika tidak disubsidi, mengingat biaya produksi yang tinggi. Biaya produksi sebagian di bawah kendali pabrik; sebagian lagi di luar kendali pabrik seperti biaya gas, pengapalan (*shipping*), bahan baku dan persaingan pupuk luar negeri.

Akibatnya, tidak semua petani dapat menikmati pupuk bersubsidi. Melalui "mekanisme seleksi" yang cukup birokratis, cukup banyak petani kita yang tidak bisa mengakses ke pupuk bersubsidi; mereka terpaksa harus membeli pupuk komersial yang lebih mahal dibandingkan dengan pupuk subsidi.

Beberapa waktu yang lalu timbul wacana, daripada pusing-pusing terus pupuk bersubsidi, apa tidak sebaiknya subsidi untuk pupuk dicabut saja. Sebagai pengantinya, subsidi itu langsung diberikan kepada petani yang membutuhkan? Hingga sekarang Pemerintah tidak berani merealisasikan wacana ini, khawatir dampaknya bisa lebih kacau, dan lebih merugikan nasib petani!

Kembali ke masalah biaya produksi eksternal yang meningkat yang kemudian mendorong makin tingginya harga pupuk, selama tahun 2021 yang ditandai dengan pandemi Covid-19 yang cukup gawat di hampir seluruh dunia, termasuk Indonesia, harga pupuk internasional pun naik cukup tinggi karena dipengaruhi oleh beragam faktor, antara lain:

1. Tingginya biaya pengapalan yang disebabkan oleh keterbatasan jumlah kapal di dunia sebagai dampak dari pandemi Covid-19. Di banyak pelabuhan internasional terjadi penumpukan barang dan antrian kapal, biaya bongkar-muat pun meningkat.

2. Tingginya harga gas dunia, khususnya di Eropa. Tingginya harga gas berpengaruh langsung terhadap biaya produksi pupuk berbasis nitrogen, yaitu urea, yang merupakan jenis pupuk yang

paling dibutuhkan dalam budidaya tanaman pangan. Menurut beberapa sumber (antara lain majalah *Ferticon*), harga urea di dunia bahkan sudah menyentuh angka USD 1.000.

3. Adanya kebijakan larangan ekspor dari Pemerintah China dan Rusia. Kedua negara ini dikenal sebagai pemasok terbesar pupuk dan bahan baku pupuk, mulai dari urea, DAP sampai KCl. Pembatasan ini menyebabkan terjadinya kekurangan pasokan pupuk di pasar internasional yang berdampak pada lonjakan harga.

Melihat kondisi harga pupuk dan bahan baku pupuk saat ini, sudah dapat dipastikan biaya produksi pupuk, termasuk di dalam negeri, akan mengalami lonjakan yang cukup signifikan. Hal ini sudah terlihat dengan tingginya harga pupuk non subsidi. Dan ini pasti juga berpengaruh terhadap biaya produksi pupuk bersubsidi.

Jadi pertanyaan sentralnya: Dengan anggaran subsidi tetap, yakni Rp 25,3 triliun, apakah pabrik-pabrik pupuk Pemerintah di bawah koordinasi PT Pupuk Indonesia (PI) masih mampu memproduksi pupuk bersubsidi sebanyak 9 juta ton seperti yang ditetapkan Kementerian Pertanian? Rasanya mustahil, karena biaya produksi pupuk selama setahun terakhir sudah merambat naik.

Masalah lain yang "mengganjal" pabrik pupuk adalah masalah piutang subsidi pupuk Pemerintah. Setiap tahun terjadi piutang BUMN Pupuk kepada Pemerintah. Dengan perkataan lain, setiap tahun Pemerintah berutang kepada Pupuk Indonesia sebagai BUMN yang menjalankan tugas memproduksi dan menyebarkan pupuk bersubsidi. Nilainya juga tidak kecil.



Prof Tjipta Lesmana
Pengamat Ketahanan Pangan

Dengar Pendapat di DPR pada Oktober 2020.

Mengapa piutang pupuk subsidi selalu terjadi, bahkan semakin besar sehingga semakin membebani biaya subsidi pupuk? Hal ini terjadi karena setiap tahun dalam menentukan anggaran pupuk subsidi, Pemerintah selalu menggunakan patokan realisasi biaya produksi dan distribusi pupuk dari realisasi tahun sebelumnya.

Padahal piutang subsidi pupuk Pemerintah merupakan beban biaya bagi pabrik-pabrik pupuk BUMN, jadi termasuk komponen biaya bagi pabrik pupuk.

Akibat beragam permasalahan pupuk bersubsidi, tampaknya Pemerintah perlu mempertimbangkan lagi jumlah alokasi pupuk bersubsidi, dari 9 juta ton mungkin dipangkas jadi 8 atau 7,5 juta ton.

Jika pemerintah tetap bersikeras memegang angka 9 juta ton sebagaimana ketentuan Menteri Pertanian, maka Pemerintah (Kementan) harus siap-siap menghadapi situasi kekurangan pupuk bersubsidi yang dialokasikan kepada petani yang berhak mendapatkannya di akhir 2022.

Di sisi lain, kita juga mendesak pabrikan pupuk agar sungguh-sungguh menjalankan efisiensi di semua lini produksi pupuk. Biaya produksi pupuk terdiri atas begitu banyak item; satu per satu harus dipolototi secara seksama dan dipangkas biayanya.

Tunjukkan kepada Pemerintah dan masyarakat petani bahwa Anda pun sungguh sudah banting tulang untuk meningkatkan efisiensi produksi seoptimalnya!! ■